



PEMERINTAH KOTA SOLOK

RENCANA KERJA

2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah telah dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diselaraskan dengan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan rencana kerja perangkat daerah lainnya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3);



8. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang terdiri dari:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rencana Kerja Sekretariat Daerah;



- b. rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- d. rencana Kerja Dinas Daerah, terdiri dari :
 - 1. Dinas Pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - 4. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 - 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - 7. Dinas Sosial;
 - 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 9. Dinas Pangan;
 - 10. Dinas Lingkungan Hidup;
 - 11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - 12. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - 13. Dinas Perhubungan;
 - 14. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - 15. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 16. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 18. Dinas Pariwisata;
 - 19. Dinas Pertanian; dan
 - 20. Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- e. rencana Kerja Badan Daerah
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Badan Keuangan Daerah;
 - 3. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - 5. Badan Penelitian Dan Pengembangan.
- f. rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
- g. rencana Kerja Kecamatan
 - 1. Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - 2. Kecamatan Tanjung Harapan.

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.



- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam pelaksanaan RKPD mengalami perubahan, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 14 november 2023

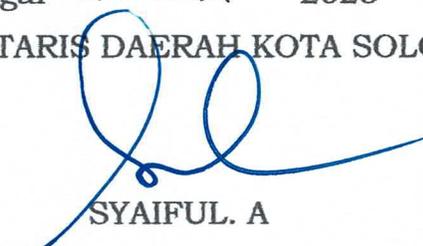
~~WALIKOTA SOLOK,~~



ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 14 november 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,



SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 57

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Daftar Tabel		ii
BAB I	Pendahuluan	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Maksud dan ujuan	3
1.4.	Sistematika Penulisan	3
BAB II	Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu	5
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	5
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda	22
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda	25
2.4.	Review Rancangan Awal RKPD	25
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	36
3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2.	Telaahan terhadap Kebijakan RPJMD	36
3.3.	Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda	36
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	38
BAB V	Penutup	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah	15
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kota Solok	24
Tabel 2.3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	26
Tabel 3.1.	Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2024	37
Tabel 4.1.	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2023	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Selain itu, kewajiban perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja (Renja) juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Renja disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kota Solok Tahun 2021 – 2026;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kota;
5. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 90 tahun 2019, maka Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rencana kerja (Renja) Bappeda Kota Solok tahun 2023 disusun secara sistematis meliputi :

- a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber pendanaan;

- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- f. Rekening.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok 2021-2026;
8. Peraturan Walikota Solok Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
9. Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya rencana kerja Bappeda adalah memberikan arah dan petunjuk tentang pelaksanaan program/kegiatan Bappeda Tahun 2024 agar pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Bappeda Kota Solok.

1.3.2. Tujuan

1. Mendeskripsikan program/kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Bappeda
2. Menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Bappeda pada tahun 2024 dalam pencapaian target/tujuan/sasaran/program dan indikator kinerja kegiatan.
3. Memantapkan akuntabilitas kinerja melalui pengukuran kinerja Bappeda sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi misi tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan
4. Menjadi dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Bappeda

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka sistematika penyusunan Renja Bappeda Kota Solok Tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU, berisi tentang: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, yang berisi penjelasan mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Pada tahun 2022, Bappeda melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp8.678.814.601,00 dan terealisasi sebesar Rp8.195.106.274,00 (94,43%). Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan pada program ini adalah sebesar Rp6.972.005.401,00 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan. Sampai dengan akhir tahun, anggaran telah dapat direalisasikan sebesar Rp6.619.439.092,00 (94,94%) dengan rata-rata realisasi fisik sebesar 100%.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp3.925.000,00. Tujuan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tersedianya pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode satu tahun dan lima tahunan. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik dan anggaran 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.
- 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp4.057.000,00. Tujuan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tersedianya laporan capaian kinerja perangkat daerah yang terukur seperti LKPj, LPPD dan laporan kinerja. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik dan anggaran 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Untuk melaksanakan dialokasikan anggaran sebesar Rp5,410.533.901,00. Tujuan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan ASN, dengan sasaran dari sub kegiatan ini adalah Aparatur Sipil Negara. Sub

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.134.718.891,00 (94,90%) dan realisasi fisik 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

2) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp4.590.000,00. Tujuan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan laporan kinerja keuangan perangkat daerah setiap bulan, semesteran beserta prognosis enam bulan berikutnya dan akhir tahun anggaran berjalan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik dan anggaran 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp11.764.000,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor dan jaringan/instalasi listrik agar operasional kantor berjalan dengan lancar. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.637.000,00 (98,92%) dan realisasi fisik 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

2) Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor

Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp90.569.100,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih untuk operasional kantor. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp84.484.300,00 (93,28%) dan realisasi fisik 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp38.404.000,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah meningkatkan kelancaran operasional kantor. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp34.644.750,00 (90,21%) dan realisasi fisik 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp6.000.000,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya tamu-tamu, baik tamu internal Bappeda maupun tamu pimpinan. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.800.000,00 (96.67%) dan realisasi fisik 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.
- 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp310.175.000,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah meningkatkan kelancaran koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp289.760.052,00 (93.42%) dan realisasi fisik 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp4.100.000,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa surat menyurat (materai dan benda pos). Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik dan anggaran 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp211.173.400,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, sumber daya air dan listrik kantor. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp196.103.284,00 (92.86%) dan realisasi fisik 100%. Tidak ada kendala pada pelaksanaan sub kegiatan ini.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp648.594.000,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan motivasi aparatur non PNS serta tersedianya jasa outsourcing kebersihan kantor. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp640.242.500,00 (98.71%) dan realisasi fisik 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp168.920.000,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah meningkatkan kelancaran operasional kantor. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp151.881.715,00 (89.91%) dan realisasi fisik 100%. Dalam pelaksanaan sub kegiatan ini terdapat kendala yaitu adanya perbedaan pelaporan pajak akhir tahun dengan pihak bengkel resmi (yang melaporkan pada tahun berikut), sehingga tidak sesuai dengan pencatatan administrasi keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian pemeliharaan kendaraan operasional pimpinan tidak dapat direalisasikan.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp22.500.000,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah meningkatkan fasilitas dan kenyamanan gedung kantor. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp22.469.600,00 (99.86%) dan realisasi fisik 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp36.700.000,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah meningkatnya kelancaran operasional kantor. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp31.025.000,00 (84.54%) dan realisasi fisik 100%. Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terdapat item peralatan komputer yang harus diganti namun sudah tidak ada dipasaran, sehingga pemeliharaannya dibatalkan.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp985.462.700,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, dan 8 (delapan) sub kegiatan. Sampai dengan akhir tahun, anggaran telah dapat direalisasikan sebesar Rp908.882.035,00 (92.23%) dengan realisasi fisik sebesar 96,37%.

a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp35.740.000,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah menghimpun dan mengoordinasikan usulan-usulan kegiatan yang dibiayai oleh DAK/APBN/APBD Provinsi tahun 2022. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp30.271.902,00 (84.70%) dan realisasi fisik 100%. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan kegiatan rapat-rapat koordinasi usulan pembiayaan DAK/APBN dan APBD Provinsi tidak jadi dilaksanakan oleh provinsi.
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik
Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp19.929.200,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah (1) memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, (2) menghimpun aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap tujuan, sasaran, program dan prioritas pembangunan daerah, (3) menyelaraskan program dan kegiatan PD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan prioritas pembangunan daerah dan (4) menyepakati prioritas pembangunan daerah. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik dan anggaran 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp73.093.300,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah (1) menyepakati permasalahan pembangunan daerah, (2) menyepakati prioritas pembangunan daerah, (3) menyepakati program, kegiatan dan sub kegiatan, (4) menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah, (5) mengklarifikasi usulan Musrenbang Kecamatan dan (6) melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik dan anggaran 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp507.294.200,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah (1) terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas berdasarkan

data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, (2) menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan, dan (3) meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp503.788.444,00 (99.31%) dan realisasi fisik 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp63.758.400,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah fasilitasi penggunaan sistem informasi pembangunan daerah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan di daerah berdasarkan data dan informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp53.735.100,00 (84.28%) dan realisasi fisik 100%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% disebabkan data perencanaan pembangunan langsung diunduh pada website *e-planning* dan SIPD Kemendagri, sehingga belanja cetak tidak direalisasikan. Serta pendampingan *e-planning* triwulan IV pada pra musrenbang telah difasilitasi oleh kelurahan, sehingga terjadi efisiensi pada honor pendampingan *e-planning*.

2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp40.537.000,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah menyajikan data dan informasi yang variatif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratis. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp25.430.029,00 (62.73%) dan realisasi fisik 100%. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan belanja cetak tidak dapat direalisasikan karena sudah menggunakan aplikasi dan sosialisasi pemanfaatan Satu Data Indonesia oleh pemerintah pusat tidak jadi dilaksanakan.

c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp59.899.800,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk mengetahui capaian kemajuan program dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana non APBD dan DAK. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp23.350.800,00 (38,98%) dan realisasi fisik 100%. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka (langsung), namun dilakukan secara zoom meeting (virtual).

2) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp185.210.800,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk mengetahui gambaran capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2020 terhadap pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021, dan capaian kinerja tahun 2021. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp179.283.260,00 (96,80%) dan realisasi fisik 100%. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk melaksanakan program ini dialokasi anggaran sebesar Rp721.346.500,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan. Sampai dengan akhir tahun, anggaran telah dapat direalisasikan sebesar Rp666.785.147,00 (92,44%) dengan rata-rata realisasi fisik sebesar 100%.

Secara rinci, alokasi dan realisasi anggaran per kegiatan dalam program ini sebagaimana berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp73.586.600,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada sub bidang pemerintahan dengan Perangkat Daerah terkait. Sub

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp72.562.200,00 (98.61%) dan realisasi fisik 105%. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

2) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp112.870.700,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan bidang social dan sumber daya manusia dengan Perangkat Daerah terkait dan memfasilitasi pengumpulan usulan pembangunan bidang sosial yang bersumber dari masyarakat (partisipatif). Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp112.416.889,00 (99.60%) dan realisasi fisik 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

3) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Untuk melaksanakan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp69.032.600,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan dan rapat koordinasi perencanaan bidang pembangunan manusia. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp68.649.171,00 (99.44%) dan realisasi fisik 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp56.919.400,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan Perangkat Daerah terkait. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp55.666.801,00 (97.80%) dan realisasi fisik 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

2) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp51.969.000,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah melaksanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan melaksanakan asistensi terhadap usulan program/kegiatan yang dibiayai melalui DAK, APBN, APBD Provinsi dan sumber dana lainnya. Sub

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp51.289.455,00 (98.69%) dan realisasi fisik 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

3) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp100.026.800,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian dengan Perangkat Daerah terkait dan terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian dengan OPD terkait tingkat provisi dan pusat. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp99.393.077,00 (99.37%) dan realisasi fisik 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp104.867.800,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan dibidang infrastruktur dengan Perangkat Daerah terkait dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp95.844.017,00 (91.40%) dan realisasi fisik 93.34%. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

2) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp120.722.600,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah (1) terwujudnya asistensi dan verifikasi usulan kegiatan bidang infrastruktur yang diusulkan melalui pendanaan APBD provinsi, APBN dan DAK, (2) terwujudnya koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan perumahan dan permukiman, dan (3) terwujudnya pemutakhiran data bidang cipta karya melalui aplikasi SIM CK (SI-SPKP, SIINSAN, SIMSPAM dan SIM BPB). Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp89.835.077,00 (74.41%) dan realisasi fisik 97.00%.

Realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% disebabkan:

- (1) Efisiensi anggaran sesuai kebutuhan untuk pendataan PSU Perumahan, dan
- (2) Cetak dokumen RPIJM tidak terealisasi karena Kementerian PUPR masih melakukan pengembangan sistem informasi bidang cipta karya.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp31.351.000,00. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang penataan ruang dan lingkungan hidup. Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp21.128.460,00 (67.39%) dan realisasi fisik 100%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% disebabkan karena efisiensi anggaran koordinasi dan konsultasi.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Bappeda dan pencapaian rencana strategis Bappeda sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
 KEADAAN S.D TAHUN 2023
 PEMERINTAHAN KOTA SOLOK**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2023)		REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2023					
			K	Rp	K	Rp	TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		TINGKAT REALISASI (%)	K	Rp	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)		
							K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
4.03. 4.03.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan																	
4.03. 4.03.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		33.561.990.004		22.234.375.866		8.678.814.601		8.195.106.274	94,43		8.544.746.680		22.234.375.866		66,25		
5.01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	- Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100 %	13.938.546.171	100 %	6.900.295.558	100 %	6.972.005.401	100 %	6.619.439.092	94,94	100 %	6.970.223.170		20.232.925.261		145,16	
5.01 01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	15.252.600	100 %	12.512.600	100 %	7.982.000	100 %	7.982.000	100,00	100 %	10.953.000		27.765.200		182,04	
5.01 01.2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dokumen Renstra PD	1 dok	6.233.200	1 dok	3.924.500	1 dok	3.925.000	1 dok	3.925.000	100,00		2.308.200	2 dok	10.157.700		162,96	
		- Dokumen Renja PD	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			1 dok		3 dok				
		- Dokumen Perubahan renja PD	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			1 dok		3 dok				
5.01 01.2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- RKA		3.682.400								1 dok	3.682.400					
		- DPA										1 dok						
		- RKA Perubahan										1 dok						
		- DPA Perubahan										1 dok						
5.01 01.2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Laporan capaian kinerja PD		2.308.200	12 dok	4.589.000	12 dok		12 dok		100,00	3 dok	2.308.200	27 dok	6.897.200		298,81	
		- Laporan semesteran			2 dok		2 dok		2 dok					4 dok				
		- Laporan akrual bulanan			12 dok		12 dok		12 dok					24 dok				
		- Laporan prognosis realisasi anggaran			1 dok		1 dok		1 dok					2 dok				
		- Laporan keuangan pemerintah daerah 2022			1 dok		1 dok		1 dok					2 dok				
5.01 01.2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Laporan kinerja PD	13 dok	6.711.200	1 dok	3.999.100	1 dok	4.057.000	1 dok	4.057.000	100,00	12 dok	2.654.200	14 dok	10.710.300		159,59	
		- Dokumen LKPJ PD	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			dok		2 dok				
		- Dokumen LPPD PD	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			dok		2 dok				
		- Evaluasi Renja PD (Triwulan)	4 dok		4 dok		4 dok		4 dok			4 dok		12 dok				
5.01 01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	10.531.291.309	100 %	4.236.674.916	100 %	5.415.123.901	100 %	5.139.308.891	94,91		5.116.167.408		14.482.151.215		137,61	
5.01 01.2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Gaji dan tunjangan ASN	28 bulan	10.521.514.409	14 bulan	4.236.674.916	14 bulan	5.410.533.901	14 bulan	5.134.718.891	94,90	14 bulan	5.110.980.508	42 bulan	14.482.374.315		137,65	
		- Tambahan penghasilan ASN	14 bulan		12 bulan		13 bulan		13 bulan			12 bulan		37 bulan				
5.01 01.2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	- Laporan capaian kinerja PD	12 dok	9.776.900			12 dok	4.590.000	12 dok	4.590.000		dok	5.186.900	12 dok	9.776.900		100,00	
5.01 01.2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Laporan semesteran	4 dok				2 dok		2 dok			2 dok		4 dok				
		- Laporan triwulan										4 dok						
		- Laporan akrual bulanan	24 dok				12 dok		12 dok			12 dok		24 dok				
		- Laporan prognosis realisasi anggaran					1 dok		1 dok			dok		1 dok				
		- Laporan keuangan akhir tahun	2 dok				1 dok		1 dok			1 dok		2 dok				
5.01 01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	39.321.000	100 %	214.029.159	100 %	-	100 %	-	0,00		39.321.000		-			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2023)		REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2023				
			K	Rp	K	Rp	TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		TINGKAT REALISASI (%)	K	Rp	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
							K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
5.01 01.2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenokapannya	- Pakaian Dinas Harian ASN dan Non ASN - Pakaian Dinas Harian eselon II/b - Pakaian Dinas Harian eselon III	60 stel	-													
5.01 01.2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah aparatur perencana untuk mengikuti diklat formal	10 OK	39.321.000	4 OK	13.220.000					0,00	10 Orang	39.321.000	14 0			
5.01 01.2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah aparatur perencana Bappeda yang ditingkatkan kapasitas pemahamannya terhadap perencanaan - Jumlah aparatur perencana PD se-Kota Solok yang ditingkatkan kapasitas pemahamannya terhadap perencanaan	0 orang 0 orang	-	50 orang 60 orang	200.809.159					0,00			50 0 60 0			
5.01 01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.070.225.310	100 %	413.137.102	100 %	456.912.100	100 %	426.326.102	93,31	613.313.210	1.452.776.414	135,74			
5.01 01.2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	9 bulan	20.749.500	12 bulan	8.866.000	9 jenis	11.764.000	9 jenis	11.637.000	98,92	8.985.500	21 jenis	29.488.500	142,12		
5.01 01.2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 bulan	98.375.000	12 bulan	63.466.300					0,00	98.375.000	12 0	161.841.300	164,51		
5.01 01.2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kompor listrik - Televisi - CCTV	0 unit	6.600.000	3 set	10.600.000					0,00	1 unit	6.600.000	3 0	17.200.000	260,61	
5.01 01.2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Alat Tulis Kantor - Alat kebersihan dan bahan pembersih	62 bulan 18 bulan	167.133.810			50 jenis 6 jenis	90.569.100	50 jenis 6 jenis	84.484.300		12 bulan 12 bulan	76.564.710	62 bulan 18 bulan	161.049.010	96,36	
5.01 01.2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan pencetakan	- Barang cetakan dan penggandaan - Jumlah paket barang cetakan - Jumlah penggandaan	12 bulan	83.364.000	12 bulan	34.644.750	12 bulan	38.404.000	12 bulan	34.644.750	90,21	44.960.000	24 bulan	114.249.500	137,05		
5.01 01.2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	- Makan dan minum tamu - Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 bulan 4 laporan	17.300.000	12 bulan 4 laporan	5.800.000	12 bulan 4 laporan	6.000.000	12 bulan 4 laporan	5.800.000	96,67	11.300.000	24 bulan	22.900.000	132,37		
5.01 01.2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Makan Minum Harian dan Rapat	12 bulan 12 bulan 12 bulan	676.703.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	289.760.052	12 bulan 12 bulan 12 bulan	310.175.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	289.760.052	93,42	366.528.000	24 bulan 24 bulan 24 bulan	946.048.104	139,80		
5.01 01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Cakupan penyediaan barang milik daerah	100 %	13.500.000	100 %	601.886.500	100 %	-	100 %	-	0,00	13.500.000	615.386.500	4558,42			
5.01 01.2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kendaraan roda 2 - Kendaraan roda 4		-	6 unit	137.358.000	6 unit		6 unit		0,00		12 unit	137.358.000	#DIV/0!		
5.01 01.2.07 05	Pengadaan Mebel	- Kursi Tamu Ruang Pimpinan - Lemari Buku - Kursi pimpinan eselon III - Kursi putar tanpa tahanan - Kursi aula - Mobler ruang klinik SIPD - Meja tulis		-	1 set 4 unit 1 unit 15 unit	58.050.000	1 set 4 unit 1 unit 15 unit		1 set 4 unit 1 unit 15 unit		0,00		2 set 8 unit 2 unit 30 unit	58.050.000	#DIV/0!		
5.01 01.2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Tangga aluminium - AC - Laptop - Printer - Infocus - Komputer all in one		13.500.000	1 unit	406.478.500	1 unit		1 unit		0,00	13.500.000	2 unit	419.978.500	3110,95		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2023)		REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2023						
			K	Rp	K	Rp	TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		TINGKAT REALISASI (%)	K	Rp	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)			
							K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6				7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		- Harddisk Eksternal - Tripod - Perangkat teleconference (studio e-planning) - Video captured - Roller blind - Solar screen - Zebra blind			1 unit 1 unit 1 paket 1 unit 100 meter 14 m2 14 m2			1 unit 1 unit 1 paket 1 unit 100 meter 14 m2 14 m2			1 unit 1 unit 1 paket 1 unit 100 meter 14 m2 14 m2					2 unit 2 unit 2 paket 2 unit 200 meter 28 m2 28 m2			
5.01 01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Cakupan jasa penunjang operasional kantor	100 %	1.731.972.952		842.662.561			863.867.400		840.445.784	97,29		868.105.552		2.551.213.897		147,30	
5.01 01.2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Materai 6000 - Jumlah Materai 3000 - Jumlah Materai 10.000	0 0 810 buah	8.100.000	200 buah 275 buah 200 buah	4.250.000			4.100.000		4.100.000	100,00		4.000.000		200 0 275 0 1010 buah		12.350.000	152,47
5.01 01.2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jasa telepon - Jasa Listrik	12 buah 11000 kwh/bulan	436.408.952	12 bulan 12270 kwh/bulan	180.285.411			211.173.400		196.103.284	92,86		225.235.552		24 bulan 23270 kwh/bulan		601.624.247	137,86
5.01 01.2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jasa Bendahara - Jasa Pembantu bendahara pengeluaran - Jasa pengelolaan barang - Jasa Pegawai Kontrak dan Sopir (10 orang) - Jasa Pegawai Non SK Wako (12 orang) - Jasa kerjasama pihak ketiga kebersihan kantor - Alat Kebersihan dan bahan pembersih	24 OB 48 OB 24 OB 228 OB 288 OB 2 paket 12 bulan	1.287.464.000	12 OB 24 OB 12 OB 120 OB 144 OB 1 paket 12 bulan	658.127.150			648.594.000		640.242.500	98,71	12 OB	638.870.000		36 OB 24 OB 12 OB 120 OB 144 OB 1 paket 24 bulan		1.937.239.650	150,47
5.01 01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	536.983.000	100 %	579.392.720	100 %		228.120.000	100 %	205.376.315	90,03		308.863.000		1.093.632.035		203,66	
5.01 01.2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau I angsan	- Pemeliharaan kendaraan operasional roda 2 (9 unit) - Pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 (4 unit)	180 unit bulan 156 unit bulan	324.205.000	48 unit bulan 108 unit bulan	144.536.150			168.920.000		151.881.715	89,91	48 unit bulan	155.285.000		228 unit bulan 264 unit bulan		451.702.865	139,33
5.01 01.2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	- Sewa Bunga - Pemeliharaan instalasi jaringan listrik - Pemeliharaan gedung kantor	12 bulan 1 2 paket	112.590.000	12 bulan 1 paket	392.526.570			22.500.000		22.469.600	99,86		90.090.000		24 bulan 3 unit		505.086.170	448,61
5.01 01.2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	24 bulan	100.188.000	12 bulan	42.330.000			36.700.000		31.025.000	84,54	12 bulan	63.488.000		36 bulan		136.843.000	136,59
5.01 02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	- Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan	85 %	1.810.366.500		1.502.982.770			985.462.700		908.882.035	92,23		837.595.800		3.006.041.295		166,05	
5.01 02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	- Persentase konsistensi perencanaan dan pendanaan	85 %	1.213.557.000	100 %	1.303.852.060	100 %		636.056.700	100 %	627.082.846	98,59		590.192.300		2.508.435.206		206,70	
5.01 02.2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	- Laporan dan Koordinasi usulan-usulan DAK/APBN/APBD Provinsi Tahun 2023	5 laporan	59.335.000	2 laporan	6.190.000			35.740.000		30.271.902	84,70	2 laporan	23.595.000		7 laporan		60.056.902	101,22
5.01 02.2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	- Berita Acara konsultasi publik RKPd Tahun 2024 - Forum PD - Berita Acara konsultasi publik RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026	3 dok 1 kali 0 dok	88.424.600	1 dok 1 kali 1 dok	31.212.100			19.929.200		19.929.200	100,00	2 dok	68.495.400		4 dok 1 0		119.636.700	135,30

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2023)		REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2023				
			K	Rp	K	Rp	TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		TINGKAT REALISASI (%)	K	Rp	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
							K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)		
5.01 02.2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	- Berita Acara Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah	2 dok	12.692.000							2 dokumen	12.692.000					
5.01 02.2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	- Berita Acara Musrenbang RKPJMD - Berita Acara Musrenbang RPJMD	2 dok 0 dok	135.838.700	1 dok 1 dok	99.721.120	1 dok	73.093.300	1 dok	73.093.300	100,00	1 dok	62.745.400	3 dok 1 0	235.559.820	173,41	
5.01 02.2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	- RKPJMD Tahun 2024 - Perubahan RKPJMD Tahun 2023 - Ranwal RPJPD	2 dok 2 dok	929.958.700	1 dok 1 dok	1.166.728.840	1 dok 1 dok	507.294.200	1 dok 1 dok	503.788.444	99,31	1 dok 1 dok 1 dok	422.664.500	3 dok 3 dok	2.093.181.784	225,08	
5.01 02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase pemanfaatan aplikasi pada tahapan perencanaan	100 %	217.078.800	100 %	151.507.960	100 %	104.295.400	100 %	79.165.129	75,90		112.783.400		343.456.489	158,22	
5.01 02.2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Tahapan penggunaan e-planning dalam penyusunan dokumen perencanaan - Satu data Kota Solok	2 tahun 1 dok	137.813.100	1 tahun	62.666.760	1 tahun	63.758.400	1 tahun	53.735.100	84,28	1 tahun 1 dok	74.054.700	3 tahun 1 dok	190.456.560	138,20	
5.01 02.2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	- Database Perencanaan Pembangunan Daerah - Forum data dan informasi tingkat kota	2 dok 4 kali	79.265.700	1 dok 1 kali	88.841.200	1 dok 2 kali	40.537.000	1 dok 2 kali	25.430.029	62,73	1 dok 2 kali	38.728.700	3 dok 5 kali	152.999.929	193,02	
5.01 02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase capaian program pada dokumen perencanaan	80 %	379.730.700	100 %	47.622.750	100 %	245.110.600	100 %	202.634.060	82,67		134.620.100		154.149.600	40,59	
5.01 02.2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota	- Laporan pelaksanaan DAK dan Non APBD	10 laporan	114.295.900	3 laporan	25.913.250	4 laporan	59.899.800	4 laporan	23.350.800	38,98	6 laporan	54.396.100	13 laporan	89.349.800	78,17	
5.01 02.2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	- Laporan Evaluasi RKPJMD	10 laporan	265.434.800	4 laporan	21.709.500	4 laporan	185.210.800	4 laporan	179.283.260	96,80	6 laporan	80.224.000	14 laporan	64.799.800	24,41	
5.01 03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	1.426.923.210		923.833.854		721.346.500		666.785.147			736.927.710		2.306.418.251	161,64	
5.01 03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Persentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	566.502.990	100 %	306.201.917	100 %	255.489.900	100 %	253.628.260	99,27		311.013.090		870.843.267	153,72	
5.01 03.2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	- Rapat Koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub bidang pemerintahan - Verifikasi dan penajaman Renja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan - Verifikasi dan penajaman Perubahan Renja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan	2 kali	73.586.600	2 kali	36.137.419	2 kali 11 PD 11 PD	73.586.600	2 kali 11 PD 11 PD	72.562.200	98,61	kali		4 kali	108.699.619	147,72	
5.01 03.2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	- Verifikasi dan Penajaman perubahan renja Perangkat Daerah tahun 2023 lingkup sub bidang pemerintahan - Verifikasi dan Penajaman renja Perangkat Daerah tahun 2024 lingkup sub bidang pemerintahan Verifikasi dan Penajaman Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2024 lingkup sub bidang pemerintahan	11 PD 11 PD 0 PD	61.633.700	10 PD 10 PD 10 PD	43.841.850	PD PD PD		PD PD PD		#DIV/0! 11 PD 11 PD	11 PD 11 PD	61.633.700	21 PD 21 PD 10 PD	105.475.550	171,13	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2023)		REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022				TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2023			
			K	Rp	K	Rp	TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022			K	Rp	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
							K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
5.01 03.2.01 04	Koordinasi Peaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	40.996.700								1 laporan	40.996.700				
5.01 03.2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<ul style="list-style-type: none"> Jasa fasilitator perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup pembangunan manusia dan sosial Rapat koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan narisnatif bidano sosial dan budava Survey penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan lingkup pembangunan sumber daya manusia dan sosial Verifikasi dan penajaman Renja Perangkat Daerah lingkup pembangunan manusia Verifikasi dan penajaman Perubahan Renja Perangkat Daerah lingkup pembangunan manusia 	360 OB 3 kali 1 kali 45 OH	112.870.700	180 OB 2 kali 2 kali	91.089.750	180 OB 1 kali	112.870.700	180 OB 1 kali	112.416.889	99,60	180 OB 2 kali 1 kali 45 OH	540 OB 5 kali 3 kali 45 0	203.506.639		180,30	
5.01 03.2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Verifikasi Renja perangkat daerah lingkup bidang pembangunan manusia Verifikasi Renja Perubahan PD lingkup bidang Pembangunan manusia Verifikasi renstra perangkat daerah lingkup bidang pembangunan daerah Jasa fasilitator perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 	9 PD 9 PD 0 PD	104.877.290	9 PD 9 PD 9 PD	72.143.800	PD PD PD			PD PD PD	#DIV/0!	9 PD 9 PD 180 OB	104.877.290	18 PD 18 PD 9 PD	177.021.090		168,79
5.01 03.2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Hardisk eksternal Rapat Monitoring Survey monitoring 	0 unit 0 kali 0 kegiatan	-	1 unit 1 kali 1 kegiatan	5.207.250	unit kali kegiatan			unit kali kegiatan	0,00		-	1 unit 1 kali 1 kegiatan	5.207.250		#DIV/0!
5.01 03.2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi sinkronisasi perencanaan bidang pembangunan manusia/laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Rapat Koordinasi penanganan stunting/dokumen rencana aksi konvergensi penanggulangan stunting Laporan survey pembangunan manusia dan sosial Rapat koordinasi urusan pembangunan manusia dan sosial 	1 kali 0 kali 2 dok 1 kali	213.534.700	2 kali 3 kali	57.781.848	kali kali	69.032.600	kali kali	68.649.171	99,44	1 laporan 1 dok 1 dok	144.502.100	3 kali 3 kali 2 dok 1 dok	270.933.119		126,88

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2023)		REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2023					
			K	Rp	K	Rp	TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022			TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)		
							K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
5.01 03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	- Persentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 %	455.007.620	100 %	460.205.268	100 %	208.915.200	100 %	206.349.333	98,77	100 %	246.092.420		912.647.021		200,58
5.01 03.2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Rapat Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang perencanaan pekonmian (urusan penanaman modal, tenaga kerja, keuangan dan Litbang) - Verifikasi dan penajaman perubahan Renja PD tahun 2023 - Verifikasi dan penajaman Renja PD tahun 2024 - Verifikasi dan penajaman Renstra PD	6 kali	123.776.000	2 kali	68.693.168	2 kali	56.919.400	2 kali	55.666.801	97,80	4 laporan	66.856.600	8 kali	191.216.569		154,49
5.01 03.2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	- Asistensi dan Verifikasi Usulan DAK, APBN dan APBD Propinsi - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, APBN, APBD Propinsi dan Sumber Dana Lainnva - Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian - Design kawasan pasar raya - Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada bidang perekonomian	11 PD	120.036.300	7 PD	270.153.200	4 PD	51.969.000	4 PD	51.289.455	98,69	7 PD	68.067.300	18 PD	389.509.955		324,49
5.01 03.2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam - Jasa Fasilitator perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Perekonomian - Verifikasi dan Penajaman Perubahan Renja PD Tahun 2023 - Verifikasi dan Penajaman Renja PD Tahun 2024 - Verifikasi dan Penajaman Renstra PD - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidaang SDA yang diakomodir Pemasuannya	3 kali	211.195.320	4 kali	121.358.900	kali	100.026.800	kali	99.393.077	99,37	3 kali	111.168.520	7 kali	331.920.497		157,16
5.01 03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	- Persentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	405.412.600	100 %	157.426.669	100 %	256.941.400	100 %	206.807.554	80,49		179.822.200		522.927.963		128,99
5.01 03.2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	- Rapat Koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub bidano infrastruktur - Jasa Fasilitator perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Infrastruktur - Verifikasi dan penajaman perubahan renja perangkat daerah tahun 2023 linokuo bidano infrastruktur - Verifikasi dan penajaman renja perangkat daerah tahun 2024 lingkup bidano infrastruktur	6 kali	216.557.300	3 kali	112.448.519	3 kali	104.867.800	2 kali	95.844.017	91,40	3 kali	111.689.500	8 kali	319.982.036		147,76

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2023)		REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022					PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2023					
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi dan penajaman renstra perangkat daerah tahun 2021-2026 linokuo bidana infrastruktur - Pendampingan proses perencanaan pembangunan partisipatif bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan di kecamatan - Pendampingan proses perencanaan pembangunan partisipatif bid IPW di kelurahan - Pendampingan proses perencanaan pembangunan partisipatif bidang IPW di OPD 	0 PD		3 PD		PD		PD			PD		3 PD			
			0 kecamatan		2 kecamatan		kecamatan		kecamatan					2 kecamatan			
			0 kelurahan		13 kelurahan		kelurahan		kelurahan					13 kelurahan			
			3 PD		3 PD		3 PD		3 PD					6 PD			
5.01 03.2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Asistensi dan verifikasi usulan kegiatan perangkat daerah dari dana APBD Provinsi dan APBN - Asistensi dan verifikasi usulan kegiatan perangkat daerah dari dana DAK - Rapat koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sektoral (Pokja PKP, Komisi Inisiasi dll) - Updating data pada aplikasi sistem informasi pembangunan kawasan permukiman (SIPKP) dan sektoral - Laporan hasil sinkronisasi renja dengan RKPD pada bidang infrastruktur - Laporan pendataan PSU Perumahan 	4 PD	158.294.000	3 PD	29.683.600	PD	120.722.600	PD	89.835.077	74,41	4 PD	37.571.400	7 PD	157.090.077		99,24
			4 PD		3 PD		PD		PD				4 PD	7 PD			
			18 kali		4 kali		12 kali		12 kali				6 kali	22 kali			
			1 kali		1 kali		1 kali		1 kali				kali	2 kali			
							1 dok		1 dok				1 laporan				
5.01 03.2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi dan penajaman renja PD tahun 2024 lingkup sub bidang Kewilayahan 	1 PD	30.561.300	1 PD	15.294.550	PD		PD		0,00	1 PD	30.561.300	2 PD	45.855.850		150,05
			0 PD		1 PD		PD		PD				PD	1 PD			
			1 PD		1 PD		PD		PD			1 PD		2 PD			
							3 kali	31.351.000	3 kali	21.128.460							
							1 PD		1 PD								
							1 PD		1 PD								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Capaian kinerja pelayanan Bappeda dianalisis berdasarkan indikator yang terdapat pada Renstra Bappeda Tahun 2021-2026. Sasaran yang ditetapkan yaitu meningkatnya kualitas perencanaan dengan indikator indeks kualitas perencanaan.

Perhitungan indeks kualitas perencanaan diperoleh melalui akumulasi peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan kualitas pengendalian perencanaan pembangunan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan

Indikator meningkatnya kualitas dokumen perencanaan yaitu persentase sinkronisasi dokumen perencanaan dengan hasil 56,90 dari 70 bobot tertinggi, yang diperoleh dari akumulasi hasil perhitungan terhadap 4 (empat) komponen sebagai berikut:

a. Analisa data pendukung perencanaan

Dengan indikator persentase data IKU, IKD dan IP yang digunakan. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah IKU, IKD dan IP yang digunakan dalam RKPD dengan jumlah IKU, IKD dan IP dalam RPJMD. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan gambaran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Sedangkan Indikator Program (IP) merupakan outcome /hasil yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada suatu kegiatan. Pada tahun 2022 IKU, IKD dan IP yang digunakan dalam RKPD sebanyak 14,69 dari 15 bobot tertinggi.

b. Keterkaitan antar dokumen perencanaan

1) Indikator persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah program RKPD yang sesuai RPJMD dan membandingkan jumlah target program RKPD yang sesuai RPJMD. Untuk tahun 2022 diperoleh nilai 9,68 dari 10 bobot tertinggi program RKPD yang sesuai RPJMD dan 4,52 dari 5 bobot tertinggi target program RKPD yang sesuai RPJMD.

2) Indikator persentase kesesuaian Renja terhadap Renstra PD. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah kegiatan Renja yang sesuai Renstra PD dan membandingkan jumlah target kegiatan yang sesuai Renstra PD. Tahun 2022 sebesar 4,88 dari 5 bobot tertinggi kegiatan Renja sesuai dengan Renstra dan 4,21 dari 5 bobot tertinggi target kegiatan sesuai Renstra PD.

c. Konsistensi dokumen perencanaan

Dengan indikator persentase konsistensi antar bab dokumen RKPD. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah permasalahan yang terjawab melalui program dan kegiatan dengan jumlah permasalahan di RKPD. Hasil capaian indikator ini sebesar 18,92 dari 20 bobot tertinggi.

d. Ketersediaan dokumen pendukung perencanaan

Dengan indikator persentase ketersediaan dokumen pendukung perencanaan, indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah dokumen pendukung perencanaan yang tersedia dengan jumlah target dokumen pendukung perencanaan. Pada tahun 2022 belum ada target dokumen pendukung perencanaan yang ditetapkan.

2. Meningkatnya kualitas pengendalian perencanaan pembangunan

Indikator meningkatnya kualitas pengendalian perencanaan pembangunan yaitu persentase pencapaian target IKU pada dokumen perencanaan dengan capaian 16,04 dari 30 bobot tertinggi, yang diperoleh dari akumulasi 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

a. Pengendalian perumusan kebijakan perencanaan

Dengan indikator persentase kesesuaian tahapan proses perencanaan. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah tahapan perencanaan tepat waktu. Pada tahun 2022 indikator ini tercapai 100% dengan bobot 5.

b. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Dengan indikator persentase capaian kinerja hasil pelaksanaan RKPD. Indikator ini diperoleh dari rata-rata capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah. Tahun 2022 diperoleh nilai 9,33 dari 10 bobot tertinggi.

c. Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah

1) Indikator persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator ini dihitung dengan membandingkan IKU RPJMD yang mencapai target dengan jumlah IKU RPJMD. Hasil capaian indikator ini sebesar 2,74 dari 5 bobot tertinggi.

2) Indikator persentase capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator ini dihitung dengan membandingkan IKD RPJMD yang mencapai target dengan jumlah IKD RPJMD. Hasil capaian indikator ini sebesar 2,79 dari 5 bobot tertinggi.

3) Indikator persentase capaian Indikator Program (IP). Indikator ini dihitung dengan membandingkan IP yang mencapai target dengan jumlah IP. Hasil capaian indikator ini sebesar 2,80 dari 5 bobot tertinggi.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					2023	Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RENSTRA 2016-2021															
1	% capaian sasaran RPJMD				80	90	100			81,52	90	65,96			
2	Peringkat penilaian perencanaan pembangunan				I	I	I			II	-	-			
3	% konsistensi antara RKPD dengan RPJMD				100	100	100			100	100	86,96			
4	% kesesuaian Renstra dengan RPJMD						100					96,69			
5	% program dalam RKPD yang dijabarkan dalam APBD				100	100	100			91,71	100	100			
6	% kegiatan dalam RKPD yang dijabarkan dalam APBD				90	93	95			95,5	96,98	100			
7	% usulan masyarakat dan stakeholder yang diakomodir dalam dokumen RKPD				60	65	70			51,1	66,40	81,75			
8	% Perangkat Daerah dengan Capaian Kinerja Tinggi				90	93	95			85	80	86,67			
RENSTRA 2021-2026															
1	Nilai Evaluasi SAKIP							BB (75)					BB (74,83)		
2	Indeks Kualitas Perencanaan							72,88					72,94		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Beberapa isu penting yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya akurasi data perencanaan
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Stakeholders;
- c. Masih belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen anggaran.
- d. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan SKPD
- e. Belum optimalnya kapasitas SDM yang tersedia di Bappeda;

2.4. Review Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja OPD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3

Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah, sehingga terjadi perbedaan rincian dengan Rancangan Awal RKPD. Selain terjadi perbedaan pada besaran anggaran tiap kegiatan, juga terdapat perbedaan pada rincian output serta target kegiatan.

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA SOLOK

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU	
1	2	3	5	4	6	7	9	10	8	11	12
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.100.000.000	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.731.910.426	
5.01	PERENCANAAN				9.100.000.000	PERENCANAAN				9.731.910.426	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	- Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100%		7.145.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	- Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100%		6.910.547.606	
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%		8.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%		10.953.000	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dokumen Renstra PD - Dokumen Renja PD - Dokumen Perubahan Renja PD	1 dok 1 dok	Bappeda	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 dok	Bappeda	2.308.200	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- RKA - DPA - RKA Perubahan - DPA Perubahan	1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	Bappeda	2.000.000	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4 dok	Bappeda	3.682.400	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- LAKIP, LKPj, LPPD	3 dok	Bappeda	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	Bappeda	2.308.200	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Laporan kinerja PD - Dokumen LKPJ PD - Dokumen LPPD PD - Evaluasi Renja PD (triwulan)	12 dok 4 dok	Bappeda	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 laporan	Bappeda	2.654.200	
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%		4.755.000.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%		5.171.399.228	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Gaji dan tunjangan ASN - Tambahan penghasilan PNS	12 bulan 14 bulan	Bappeda	4.750.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/bulan	Bappeda	5.166.212.328	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU	
1	2	3	5	4	6	7	9	10	8	11	12
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	- Laporan semesteran - Laporan triwulan - Laporan akrual bulanan - Laporan keuangan akhir tahun	2 dok 4 dok 12 dok 1 dok	Bappeda	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	19 laporan	Bappeda	5.186.900	
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Laporan capaian kinerja PD - Laporan semesteran - Laporan akrual bulanan - Laporan keuangan akhir tahun	12 dok 2 dok 12 dok 1 dok			-	-	-	-	-	
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%		85.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%		39.309.000	
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Pakaian Dinas Harian ASN dan Non ASN - Pakaian Dinas Harian eselon II/b - Pakaian Dinas Harian eselon III	60 stel 1 stel 5 stel	Bappeda	35.000.000	-	-	-	-	-	
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah aparatur perencana untuk mengikuti diklat formal	10 OK	Bappeda	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 OK	Bappeda	39.309.000	
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%		597.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%		447.571.710	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	9 paket	Bappeda	8.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	Bappeda	8.648.000	
5.01.01.2.06.02	-	-	-	-	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Bappeda	2.850.000	
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kompor listrik - Televisi - CCTV - Dispenser		Bappeda	10.000.000						
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Alat Tulis Kantor - Alat Kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan 12 bulan		110.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	Bappeda	63.945.710	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Bappeda	33.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	Bappeda	40.550.000	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Makan dan minum tamu	12 bulan	Bappeda	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	Bappeda	7.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU	
1	2	3	5	4	6	7	9	10	8	11	12
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Makan Minum Harian dan Rapat	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Bappeda	420.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	Bappeda	324.578.000	
5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Cakupan penyediaan barang milik daerah	100%		525.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Cakupan penyediaan barang milik daerah	100%		64.000.000	
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kendaraan roda 2 - Kendaraan roda 4	1 unit	Bappeda	400.000.000						
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	- Kursi aula - Mobiler ruang klinik SIPD - Kursi putar - Kursi Eselon II - Kursi Eselon III - Meja kerja	5 unit	Bappeda	50.000.000						
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banunan Lainnva	- AC - LCD proyektor - Layar proyektor - Komputer All In One - Laptop - Printer - Foto presiden dan wakil - Foto walikota dan wakil - Soundsystem aula	6 unit	Bappeda	75.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banunan Lainnva	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnva vana Disediakan	6 unit	Bappeda	64.000.000	
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Cakupan jasa penunjang operasional kantor	100%		900.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Cakupan jasa penunjang operasional kantor	100%		871.706.668	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Materai 10000	500 buah	Bappeda	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	Bappeda	4.000.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jasa telepon - Jasa Listrik	12 bulan 12.270 kwh/bulan	Bappeda	250.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	Bappeda	225.596.668	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jasa bendaharawan pengeluaran - Jasa pembantu bendahara pengeluaran - Jasa pengelola barang - Jasa pegawai kontrak dan sopir - Jasa pegawai kontrak non SK Wako (13 orang) - Jasa kerjasama pihak ketiga kebersihan kantor	12 OB 24 OB 12 OB 120 OB 156 OB 1 paket	Bappeda	645.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Bappeda	642.110.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU	
1	2	3	5	4	6	7	9	10	8	11	12
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%		275.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%		305.608.000	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lain-lain	- Pemeliharaan kendaraan operasional roda 2 (9 unit) - Pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 (4 unit)	16 unit	Bappeda	160.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lain-lain	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	Bappeda	164.790.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	- Pemeliharaan Gedung Kantor - Sekat ruangan - Pemeliharaan instalasi listrik	1 unit	Bappeda	65.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Bappeda	90.090.000	
5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	16 unit	Bappeda	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	Bappeda	50.728.000	
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	- Persentase capaian kinerja perangkat daerah	85%		940.000.000	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	- Persentase pencapaian target IKU pada dokumen perencanaan	80%		2.016.743.240	
							- Persentase konsistensi antar bab dokumen RKPD	90%			
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	- Persentase konsistensi perencanaan dan pendanaan	85%		650.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	- Persentase sinkronisasi dokumen perencanaan	85%		1.764.122.740	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	- Laporan dan Koordinasi Usulan-Usulan DAK/APBN/APBD Provinsi	2 dokumen	Bappeda	25.000.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	- Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 dokumen	Bappeda	7.620.000	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	- Berita Acara Konsultasi Publik RKPD	2 dokumen	Bappeda	25.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	- Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 berita acara	Bappeda	61.958.900	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	- Berita Acara Musrenbang RKPD	1 dokumen	Bappeda	100.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	- Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 berita acara	Bappeda	51.075.400	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	- RKPD - Perubahan RKPD - RPJMD - RPJPD	1 dok 1 dok	Bappeda	500.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RP,IPD/RP,IMD/RKPD)	4 dokumen	Bappeda	1.643.468.440	
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase keterisian data IKU dan IKD - Persentase pemanfaatan aplikasi pada tahapan perencanaan	80% 100%		145.000.000	Kegiatan Analisis Data dan Informasi pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase data IKU, IKD dan IP yang digunakan dalam RKPD	90%		142.422.900	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU	
1	2	3	5	4	6	7	9	10	8	11	12
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Tahapan penggunaan e-planning dalam penyusunan dokumen perencanaan - Satu data Kota Solok	3 dokumen	Bappeda	75.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Jumlah dokumen hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen	Bappeda	63.313.200	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	- Forum data dan informasi tingkat kota - Database Perencanaan Pembangunan Daerah		Bappeda	70.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	- Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	35 orang	Bappeda	29.109.700	
						Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	- Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku	Bappeda	50.000.000	
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase capaian program pada dokumen perencanaan - Persentase capaian IKD pada dokumen perencanaan	85% 85%		145.000.000	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase kesesuaian tahapan proses perencanaan - Persentase capaian kinerja hasil pelaksanaan RKPD - Persentase capaian IKU, IKD, dan IP	100% 80% 75%		110.197.600	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota	- Laporan pelaksanaan DAK dan Non APBD	6 laporan	Bappeda	80.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota	- Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 laporan	Bappeda	34.358.700	
						Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	- Jumlah Kerjasama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	3 kerjasama	Bappeda	20.000.000	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	- Laporan Evaluasi RKPD	6 laporan	Bappeda	65.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 laporan	Bappeda	55.838.900	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%		1.015.000.000	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	95%		804.619.580	
							- Persentase kesesuaian Renja terhadap Renstra PD	95%			
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Persentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%		335.000.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase kesesuaian Renja terhadap Renstra PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase ketersediaan dokumen pendukung perencanaan	95% 95% 100%		465.343.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU	
1	2	3	5	4	6	7	9	10	8	11	12
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Laporan Rapat Koordinasi Perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub bidangnya pemerintahan - Verifikasi dan penajaman Renja PD - Verifikasi dan penajaman Perubahan Renja PD - Verifikasi dan penajaman Renstra	3 Kali 10 PD 10 PD	Bappeda		-	-	-	-	-	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	- Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	11 PD	Bappeda	71.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	- Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 laporan	Bappeda	55.033.700	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Peaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	- Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 laporan	Bappeda	39.000.000						
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Rapat koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan partisipatif bidang sosial budaya - Verifikasi dan penajaman Renja PD - Verifikasi dan penajaman Perubahan Renja PD - Verifikasi dan penajaman Renstra - Jasa Fasilitator Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	1 kali 9 PD 9 PD 180 OB	Bappeda		-	-	-	-	-	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Jasa fasilitator perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya - Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	180 OB 9 PD	Bappeda	150.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 laporan	Bappeda	112.269.800	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) - Jumlah Dokumen Rencana Aksi Konvergensi Penanggulangan Stunting	1 dok 1 dok	Bappeda	75.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 laporan	Bappeda	298.039.500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU	
1	2	3	5	4	6	7	9	10	8	11	12
		- Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) - Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 dok 1 laporan								
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	- Persentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%		320.000.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	- Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam - Persentase kesesuaian Renja terhadap Renstra PD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	95% 95%		191.110.900	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rapat Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian Master Plan Pengembangan Ekonomi Syariah Kota Solok Verifikasi dan penajaman renja PD Verifikasi dan penajaman perubahan renja PD - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	10 dok	Bappeda	115.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 dokumen	Bappeda	49.864.200	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi dan verifikasi usulan DAK, APBN, APBD Propinsi dan sumber lainnya Monev pelaksanaan DAK, APBN, APBD Propinsi dan sumber lainnya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian - Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	7 laporan	Bappeda	85.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	- Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 laporan	Bappeda	49.858.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU	
1	2	3	5	4	6	7	9	10	8	11	12
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jasa Fasilitator perencanaan pembangunan bidang perencanaan perekonomian Rapat Koordinasi perencanaan pembangunan pertanian dan pangan, pertanian dan pemberdayaan masyarakat Asistensi dan Verifikasi usulan kegiatan OPD yang dibiayai pemerintah Pusat dan Provinsi Verifikasi dan penajaman renja PD Verifikasi dan Penajaman Perubahan Renja PD Verifikasi dan penajaman Renstra Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dok	Bappeda	120.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen		91.388.700	
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	- Persentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		360.000.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	- Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Persentase kesesuaian Renja terhadap Renstra PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95% 95%		148.165.680	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jasa Fasilitator Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah - Pendampingan Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif Bidang PIPW di OPD - Rapat koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub bidang infrastruktur - Verifikasi dan penajaman perubahan renja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur - Verifikasi dan penajaman renja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur - Verifikasi dan penajaman Renstra perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur	180 OB 2 PD 3 kali 2 PD 2 PD	Bappeda		-	-	-	-	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU	
1	2	3	5	4	6	7	9	10	8	11	12
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	- Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	3 PD	Bappeda	175.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	- Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Bappeda	98.091.780	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	- Asistensi dan verifikasi usulan kegiatan perangkat daerah dari dana APBD Provinsi dan APBN - Asistensi dan verifikasi usulan kegiatan perangkat daerah dari dana DAK - Rapat koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sektoral - Updating data pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Kawasan Permukiman (SIPKP) dan sektoral - Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	1 laporan	Bappeda	115.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	- Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja dengan RKPD pada Bidang Infrastruktur	1 laporan	Bappeda	27.265.600	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	- Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan	1 PD	Bappeda	70.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	- Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 laporan	Bappeda	22.808.300	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	- Verifikasi dan Penajaman Renja PD Lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup - Verifikasi dan Penajaman Perubahan Renja PD Lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup - Verifikasi dan Penajaman Renstra PD Lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup - Rapat koordinasi/ harmonisasi/ sinergitas perencanaan (sumber dana APBD dan non APBD)	1 PD 1 PD 3 kali	Bappeda		-	-	-	-	-	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kota. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan OPD Kota. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila maka pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu **Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur** yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2022 berada pada tahap jangka menengah yang ke-tiga yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 dengan visi **Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Makmur, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**.

3.2. Telaahan terhadap Kebijakan RPJMD

Renja Bappeda mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Solok Tahun 2021-2026. Kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Solok, Bappeda berkontribusi untuk mendukung pencapaian Misi ke-5 (lima) yaitu peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih, efektif dan efisien.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Bappeda.

Adapun tujuan dan sasaran Bappeda untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut: “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas” dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan adalah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan” dengan indikator Indeks Kualitas Perencanaan.

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target						IKU	PK
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	1. Nilai Evaluasi SAKIP			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		
		Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	NA	72,28	72,88	78,24	82,84	83,44	84,44		√	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Usulan program dan kegiatan Bappeda tahun 2024 sebanyak 3 program, 12 kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.731.910.426,00.

Berikut rincian program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - a) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - b) Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - c) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - d) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
 - c) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota
3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - b) Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
 - c) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - a) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - c) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- b) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - c) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- a) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - b) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - c) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Rincian pendanaan pada setiap program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SOLOK
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						9.731.910.426,00							8.590.533.904,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9.627.259.926,00							8.511.458.904,00	
	-	-						9.627.259.926,00							8.511.458.904,00	
1.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase pencapaian target IKU pada dokumen perencanaan Persentase konsistensi antar bab dokumen RKPD</i>	% %		% %	80 % 90 %	2.040.847.266,00						80 % 90 %	976.958.900,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Persentase sinkronisasi dokumen perencanaan</i>	%		%	85 %	1.858.226.766,00						3 Dokumen	686.958.900,00	
	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah</i>	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	7.620.000,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabilita s Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkata n kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	3 Dokumen	25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</i>	Berita Acara		Berita Acara	2 Berita Acara	51.266.900,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	2 Berita Acara	51.266.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>	Berita Acara		Berita Acara	2 Berita Acara	10.692.000,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	2 Berita Acara	10.692.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	Berita Acara		Berita Acara	2 Berita Acara	51.075.400,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	2 Berita Acara	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	1.737.572.466,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	4 Dokumen	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase data IKU, IKD dan IP yang digunakan dalam RKPD</i>	%		%	90 %	92.422.900,00						1 Dokumen	145.000.000,00	
	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i>	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	63.313.200,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	1 Dokumen	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi</i>	Orang		Orang	35 Orang	29.109.700,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	35 Orang	70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase capaian IKU, IKD, dan IP Persentase kesesuaian tahapan proses perencanaan Persentase capaian kinerja hasil pelaksanaan RKPD</i>	% % %		% % %	75 % 100 % 80 %	90.197.600,00						6 Laporan	145.000.000,00	
	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>	Laporan		Laporan	6 Laporan	37.283.700,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	6 Laporan	80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>	Laporan		Laporan	6 Laporan	52.913.900,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	6 Laporan	65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase kesesuaian Renja terhadap Renstra PD Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD</i>	% %		% %	95 % 95 %	804.609.670,00						95 % 95 %	1.015.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase kesesuaian Renja terhadap Renstra PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase ketersediaan dokumen pendukung perencanaan</i>	% % %		% % %	95 % 95 % 100 %	465.333.090,00						11 Laporan	335.000.000,00	
	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>	Laporan		Laporan	11 Laporan	55.033.700,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	11 Laporan	110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	Laporan		Laporan	9 Laporan	102.067.290,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	9 Laporan	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>	Laporan		Laporan	4 Laporan	308.232.100,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	4 Laporan	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Persentase kesesuaian Renja terhadap Renstra PD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</i>	% %		% %	95 % 95 %	191.110.900,00						10 Dokumen	320.000.000,00	
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	49.864.200,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	10 Dokumen	115.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>	Laporan		Laporan	1 Laporan	49.858.000,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	1 Laporan	85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</i>	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	91.388.700,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	4 Dokumen	120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Persentase kesesuaian RKPDP dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase kesesuaian Renja terhadap Renstra PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	% %		% %	95 % 95 %	148.165.680,00						3 Laporan	360.000.000,00	
	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	Laporan		Laporan	3 Laporan	98.091.780,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	3 Laporan	175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>	Laporan		Laporan	1 Laporan	27.265.600,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	1 Laporan	115.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	Laporan		Laporan	1 Laporan	22.808.300,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	1 Laporan	70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor</i>	%		%	100 %	6.781.802.990,00						100 %	6.519.500.004,00	
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	%		%	100 %	10.953.000,00						2 Dokumen	26.000.004,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2.308.200,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	2 Dokumen	2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
-		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	3.682.400,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	4 Dokumen	20.000.004,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Laporan		Laporan	3 Laporan	2.308.200,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	3 Laporan	2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
-		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Laporan		Laporan	16 Laporan	2.654.200,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	16 Laporan	2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
-		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah</i>	%		%	100 %	5.171.399.228,00						34 Orang/bulan	4.755.000.000,00	
-		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Orang/bulan		Orang/bulan	34 Orang/bulan	5.166.212.328,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	34 Orang/bulan	4.750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Laporan		Laporan	19 Laporan	5.186.900,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	19 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	39.321.000,00						10 Orang	50.000.000,00	
-		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	10 Orang	39.321.000,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	10 Orang	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	452.071.210,00						3 Paket	578.500.000,00	
-		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	3 Paket	64.747.210,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	3 Paket	110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
-		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	5 Paket	43.796.000,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	5 Paket	33.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
-		Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	4 Laporan	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
-		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	4 Laporan	336.528.000,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	4 Laporan	420.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang operasional kantor	%		%	100 %	900.505.552,00						4 Laporan	900.000.000,00	
-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Laporan		Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	4 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Laporan		Laporan	24 Laporan	225.235.552,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	24 Laporan	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Laporan		Laporan	12 Laporan	671.270.000,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	12 Laporan	645.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</i>	%		%	100 %	207.553.000,00						16 Unit	210.000.000,00	
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Unit		Unit	16 Unit	155.285.000,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	16 Unit	160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Unit		Unit	16 Unit	52.268.000,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	16 Unit	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X	-						104.650.500,00							79.075.000,00	
	-	-						104.650.500,00							79.075.000,00	
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Unit		Unit	1 Unit	90.090.000,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi peran dan fungsi rumah ibadah untuk pemberdayaan umat beragama	-	1 Unit	65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah</i>	%		%	100 %	14.560.500,00						9 Paket	14.075.000,00	
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Paket		Paket	9 Paket	8.985.500,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	9 Paket	8.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Paket		Paket	3 Paket	5.575.000,00	- Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi	-	3 Paket	5.575.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	J U M L A H							9.731.910.426,00							8.590.533.904,00	

4.2 Gender Analisis Pathway (GAP)

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Perangkat Daerah : Bappeda
 Unit Kerja : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kebijakan/ Program/ Kegiatan/ Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/ Data Dasar Base Line	Target Kinerja/ Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</p> <p>Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Konsultasi Publik 2. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota</p>	<p>Akses :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laki-laki dan perempuan yang mengikuti Musrenbang RKPDP 167 orang - Jumlah pejabat pengambil kebijakan ditingkat OPD 31 orang terdiri dari 25 laki-laki dan 6 perempuan <p>Partisipasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta yang hadir berdasarkan undangan pelaksanaan Musrenbang Kota adalah 167 orang, terdiri dari 87 laki-laki dan 80 perempuan - Persentase peserta yang berperan aktif memberikan usulan program/kegiatan pada Musrenbang Kota adalah 70% laki-laki dan 30% perempuan <p>Kontrol :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPDP - Permendagri 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah - Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 	<p>Akses :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi perencanaan hanya terbatas pada golongan masyarakat tertentu <p>Partisipasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar peserta adalah laki-laki, sebanyak 112 orang - Peserta dari unsur pemerintahan (pejabat) laki-laki sebanyak 25 orang - Peserta dari unsur organisasi perempuan 9 orang <p>Kontrol :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peserta Musrenbang laki-laki sebanyak 87 orang dan perempuan sebanyak 80 orang - Masih rendahnya pengetahuan tentang isu gender dikalangan aparat pemerintah maupun masyarakat - Pejabat yang hadir untuk berbicara atau memberi tanggapan 70% laki-laki dan 30% perempuan - Peserta perempuan yang berpartisipasi aktif dalam diskusi 25 orang - Rendahnya kepedulian aparat pemerintah maupun masyarakat tentang isu gender 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada Konsultasi publik, Forum PD dan Musrenbang - Sedikitnya kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan - Belum adanya "tools" di Bappeda untuk menilai apakah program/ kegiatan OPD sudah responsif gender atau belum 	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri 54 tahun 2010 belum mengatur berapa jumlah keterwakilan laki-laki dan perempuan dalam Konsultasi Publik, Forum PD dan Musrenbang - Masih rendahnya komitmen pejabat OPD terkait isu gender sesuai tupoksi dalam dokumen perencanaan - Belum optimalnya Focal Point Gender seluruh OPD - Belum optimalnya OPD memanfaatkan data terpilah dalam penyusunan program/kegiatan 	<p>Tersedianya dokumen perencanaan yang responsif gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan regulasi tentang keikutsertaan minimal 30% perempuan dalam Konsultasi Publik, Forum PD dan Musrenbang Kota - Mengidentifikasi pejabat eselon laki-laki dan perempuan di OPD untuk dijadikan peserta Konsultasi Publik, Forum PD dan Musrenbang Kota - Melakukan klasifikasi kehadiran antara laki-laki dan perempuan pada daftar hadir - Menambahkan materi yang menjelaskan masalah gender pada Musrenbang - Menambahkan kuota peserta bagi unsur keterwakilan perempuan menjadi minimal 3 orang peserta - Pemanfaatan data terpilah oleh OPD untuk menyusun program/kegiatan yang responsif gender 	<p>Persentase OPD yang memiliki dokumen GAP dan GBS pada lampiran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah 85%</p>	<p>Output : Rumusan Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Konsultasi Publik - Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah - Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota - Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan/ Program/ Kegiatan/ Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/ Data Dasar Base Line	Target Kinerja/ Indikator Gender
Tujuan : - Rancangan RKPD yang responsif gender	Manfaat : - Persentase OPD yang memiliki dokumen GAP dan GBS pada lampiran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah 80% - Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD belum memberikan kemanfaatan pada IPG dan IDG sehingga trend peningkatan IPG belum signifikan IPG 2018 : 97,24 2021 : 97,05 2019 : 97,24 2022 : 96,67 2020 : 97,05 IDG 2017: 56,20 2020 : 57,46 2018 : 55,76 2021 : 63,09 2019 : 58,47	Manfaat : - Rendahnya komitmen Kepala OPD untuk mengimplementasikan isu gender pada rumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan - Belum optimalnya kebijakan implementasi gender dalam dokumen perencanaan				- Mendorong OPD untuk menyusun program/kegiatan yang responsif gender pada saat verifikasi dan penajaman Renja PD - Penyediaan media informasi perencanaan pembangunan kepada publik	Indikator Kinerja - Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik - Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah - Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota - Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Outcome: - Persentase OPD yang melampirkan GAB dan GBS pada dokumen perencanaan tahunan meningkat dari 85% menjadi 90%	


 Solok, Juni 2023
 KERAJAAN BAPPEDA KOTA SOLOK
 D. DESMON, M.Pd
 NIP. 19681020 199403 1 004



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20170 Fax. (0755) 20170
SOLOK

Kode Pos : 27314

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

Perangkat Daerah	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																
Tahun Anggaran	:	2024																
Program	:	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah																
Kode Program	:	5.01.02																
Analisis Situasi	:	<p>1. Data pembuka wawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laki-laki dan perempuan yang mengikuti Musrenbang RKPD 167 orang - Jumlah pejabat pengambil kebijakan ditingkat OPD 31 orang terdiri dari 25 laki-laki dan 6 perempuan - Jumlah peserta yang hadir berdasarkan undangan pelaksanaan Musrenbang Kota adalah 167 orang, terdiri dari 87 laki-laki dan 80 perempuan - Persentase peserta yang berperan aktif memberikan usulan program/kegiatan pada Musrenbang Kota adalah 70% laki-laki dan 30% perempuan - Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD - Permendagri 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah - Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah - Persentase OPD yang memiliki dokumen GAP dan GBS pada lampiran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah 80% - Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD belum memberikan kemanfaatan pada IPG dan IDG sehingga trend peningkatan IPG belum signifikan <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>IPG</td> <td>2018 : 97,24</td> <td>2019 : 97,24</td> <td>2020 : 97,05</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2021 : 97,05</td> <td>2022 : 96,67</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IDG</td> <td>2017: 56,2</td> <td>2018 : 55,76</td> <td>2019 : 58,47</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2020 : 57,46</td> <td>2021 : 63,09</td> <td></td> </tr> </table> <p>2. Isu dan faktor kesenjangan gender</p> <p>a. Faktor kesenjangan</p> <p>Aspek akses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi perencanaan hanya terbatas pada golongan masyarakat tertentu 	IPG	2018 : 97,24	2019 : 97,24	2020 : 97,05		2021 : 97,05	2022 : 96,67		IDG	2017: 56,2	2018 : 55,76	2019 : 58,47		2020 : 57,46	2021 : 63,09	
IPG	2018 : 97,24	2019 : 97,24	2020 : 97,05															
	2021 : 97,05	2022 : 96,67																
IDG	2017: 56,2	2018 : 55,76	2019 : 58,47															
	2020 : 57,46	2021 : 63,09																

		<p>Aspek partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar peserta adalah laki-laki, sebanyak 112 orang - Peserta dari unsur pemerintahan (pejabat) laki-laki sebanyak 25 orang - Peserta dari unsur organisasi perempuan 9 orang <p>Aspek kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peserta Musrenbang laki-laki sebanyak 87 orang dan perempuan sebanyak 80 orang - Masih rendahnya pengetahuan tentang isu gender dikalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat - Pejabat yang hadir untuk berbicara atau memberi tanggapan 70% laki-laki dan 30% perempuan - Peserta perempuan yang berpartisipasi aktif dalam diskusi 25 orang - Rendahnya kepedulian aparatur pemerintah maupun masyarakat tentang isu gender <p>Aspek manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya komitmen Kepala OPD untuk mengimplementasikan isu gender pada rumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan - Belum optimalnya kebijakan implementasi gender dalam dokumen perencanaan <p>b. Penyebab internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada Konsultasi publik, Forum PD dan Musrenbang - Sedikitnya kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan - Belum adanya tools di Bappeda untuk menilai apakah program/kegiatan OPD sudah responsif gender atau belum <p>c. Penyebab eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permendagri 54 tahun 2010 belum mengatur berapa jumlah keterwakilan laki-laki dan perempuan dalam Konsultasi Publik, Forum PD dan Musrenbang - Masih rendahnya komitmen pejabat OPD terkait isu gender sesuai tupoksi dalam dokumen perencanaan - Belum optimalnya Focal Point Gender seluruh OPD - Belum optimalnya OPD memanfaatkan data terpilah dalam penyusunan program/kegiatan
Hasil/ Tujuan	:	Penyempurnaan dokumen perencanaan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
Indikator Kinerja	:	Input : Dana Rp1.858.000.000,00
		<p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rancangan dokumen perencanaan yang responsif gender Tahun 2024, dokumen perencanaan yang disusun berupa RKPD, Perubahan RKPD, rancangan RPJMD dan rancangan RPJPD. <p>RKPD merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pagu indikatif pendanaan. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD dan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.</p>

		<p>RPJMD merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi dan misi kepala daerah terpilih, yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD.</p> <p>RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yang menjabarkan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah.</p>
		<p>Outcome</p> <p>Persentase OPD yang melampirkan GAB dan GBS pada dokumen perencanaan tahunan meningkat dari 85% menjadi 100%</p>
Rencana Aksi	:	<p>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan sub kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Konsultasi Publik - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Solok, Juni 2023

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK,



Dr. DESMON, M.Pd
NIP. 19681020 199403 1 004

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas. Renja Tahun 2024 disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya serta dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra PD)

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Bappeda berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Bappeda Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2024, dimana Renja Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergi, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda, seluruh aparatur Bappeda secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Solok, 2023
KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK,

Dr. DESMON, M.Pd
NIP. 19681020 199403 1 004